



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADRIANUS ELIASTA MELIALA**
2. Jabatan : **ANGGOTA OMBUDSMAN RI**
3. NHK : **173566**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.840.593.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m²/400 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 431.752.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/83 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 161.705.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m²/70 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 90.816.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m²/63 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.017.000.000
5. Tanah Seluas 135 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp.
139.320.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.098.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
390.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
518.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 607.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.750.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 650.716.000

Sub Total Rp. 4.217.059.000



III. HUTANG

Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.167.059.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.